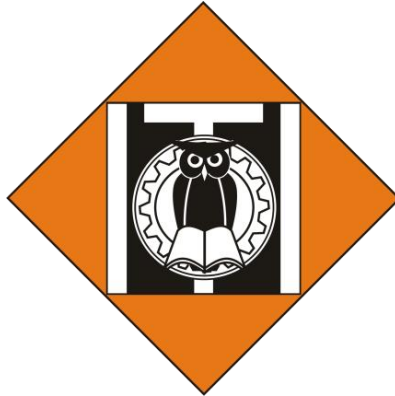


# LAPORAN PENELITIAN



## KAJIAN PEMBANGUNAN PRASARANA DESA BERWAWASAN LINGKUNGAN

*NO: 057/ST-PLT/PRM- PP/ITI/V/2021*

**PENELITI**

**MUHAMMAD ISMAN TUMIWA, ST. MSi**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

**SERPONG**

**SEPTEMBER 2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kajian Pembangunan Prasarana Desa  
Berwawasan Lingkungan  
Jenis Penelitian : Pengembangan  
Bidang Penelitian : Social Sciences(Studies in Human Society)  
Tujuan Sosial Ekonomi : Environmental Knowledge (Social environment)  
Peneliti  
Nama Lengkap : Muhammad Isman Tumiwa, ST. MSi  
NIDN : 0311035801  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Teknik Sipil – Institut Teknologi Indonesia  
No. Hp : 085692899914  
Alamat Surel (e-mail) : muhammadismantumiwa@yahoo.co.id  
Waktu Pelaksanaan : Semester Genap Thn 2020/2021  
Sumber Dana : Mandiri  
Jumlah Dana : Rp 2.000.000,-

Tangerang Selatan, 09 September 2021

Mengetahui  
Program Studi Teknik Sipil

**Ketua**



(Ir Rachmi Yanita, MT )  
NIDN.0330095701

**Ketua Tim**



(Muh. Isman Tumiwa, ST. MSi)  
NIDN. 0311035801

**Menyetujui**  
**Kepala PRPM ITI**



(Dr. Ir. Joelianingsih, MT)  
NIDN. 0310076406





# INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Jl. Raya Puspiptek, Tangerang Selatan - 15314  
(021) 7562757

[www.iti.ac.id](http://www.iti.ac.id) [institutteknologiindonesia](https://www.instagram.com/institutteknologiindonesia) [@kampusITI](https://www.facebook.com/kampusITI) [Institut Teknologi Indonesia](https://www.youtube.com/channel/UC...)

## SURAT TUGAS

No. : 057/ST-PLT/PRPM-PP/ITI/V/2021

**Pertimbangan** : Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Penelitian bagi Dosen Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Indonesia, perlu dikeluarkan surat tugas.

**Dasar** : 1. Pembebanan Tugas dosen Program Studi Teknik Sipil  
2. Surat Permohonan Tanggal 22 April 2021  
3. Kepentingan ITI

## DITUGASKAN

**Kepada** : Dosen Program Studi Teknik Sipil-ITI (Terlampir)

**Untuk** : 1. Melaksanakan kegiatan Penelitian pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021  
2. Melaporkan hasil tugas kepada Kepala PRPM-ITI.  
3. Dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tangerang Selatan, 3 Mei 2021

**Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Institut Teknologi Indonesia  
Kepala**

  
Dr. Ir. Joelianingsih, MT.



Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor
2. Ka. Biro SDMO
3. Ka. Prodi Teknik Sipil
4. Arsip

DAFTAR PENELITIAN DOSEN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL SEMESTER GENAP THN AKADADEMIK: 2020/2021

NO	TOPIK PENELITIAN	BIDANG	SUSUNAN TIM	SUMBER DANA	JUMLAH DANA (Rp)	KETERLIBATAN PRODI/INSTITUSI LAIN	KETERLIBATAN MAHASISWA
1	Manfaat Bekisting Bondok pada Pembangunan Gedung Bertingkat Tinggi	Engineering and Technology	1.Ir. Rachimi Yanita, M.T. (Ketua) 2.Terry Novi Ardian (anggota)	Mandiri	2,000,000	Tidak Ada	Terry Novi Ardian (1211520037)
2	Kajian pembangunan prasarana desa berwawasan lingkungan	Lingkungan	Muhammad Isman Tumiwa, ST, Msi (Ketua)	Mandiri	2,000,000	Tidak Ada	
3	Lesson-learned from Covid-19 Outbreak of Soreang District (Indonesia) Hospital Construction Project: Regulation and Contract Review (International Journal)	Manajemen Konstruksi	Prof. Ir. Krishna Mochtar, MSCE., Ph.D., IPU.(Ketua)	Mandiri	2,000,000	Tidak Ada	
4	Obstacles of Building Inforation Modelling (BIM) Implementation in Tangerang Selatan, Indonesia (International Journal)	Manajemen Konstruksi	Prof. Ir. Krishna Mochtar, MSCE., Ph.D., IPU. (Ketua)	Mandiri	2,000,000	Tidak Ada	Lambang Prasetyo (1211500058)
5	Menulis Modul Menggambar Struktur Bangunan	Infrastruktur	Ir. Abrar Husen, MT (Ketua)	Mandiri	2,000,000	Tidak Ada	
6	Kajian Pola Interaksi Land Use dengan Volume Penumpang Bus BSD Link Sektor 1.3 - Greenwich Park	Transportasi	1.Verdy Ananda Upa, S.T., M.T. (Ketua) 2.Ir. Rahmat Setyadi, M.T.(Anggota)	Mandiri	2.000.000	Tidak Ada	
7	Analisis Karakteristik Perjalanan Penumpang Bus Trans Tangerang AYO Menggunakan Demand Modelling Method (Studi Kasus : Koridor Tangerang City - CBD Ciledug)	Transportasi	Verdy Ananda Upa, S.T., M.T. (Ketua)	Mandiri	2.000.000	Tidak Ada	Fajar Nur Alim Mustofa (1211700042)
8	Kajian lokasi Rest Area (Tempat istirahat) sebagai lokasi transit asngkutan umum	Transportasi	Ir. Nur Hakim, MCE.(Ketua)	Mandiri	2,000,000	Tidak Ada	Arya Pandu Dwimata 1231600009
9	Kontribusi Limbah Serat Sekam Padi Dalam Beton	Material Teknik Sipil	1.Dr.Sc-Ing.Ir. Riana Herlina L, MT (ketua); 2.Ir. Abrar Husen, MT ( anggota)	Hibah internal ITI	8,000,000	Tidak Ada	
10	Konstruksi Jalan Komposit	Transportasi	Ir. Rahmat Setyadi, M.T.	Mandiri	2,000,000	Tidak Ada	
11	Evaluasi perilaku penurunan tanah pada konstruksi bangunan stone crusher plant di Maloko	Rekayasa Geoteknik	Abi Maulana Hakim, S.T., M.T.	Mandiri	2,000,000	Tidak Ada	

## KATA PENGANTAR

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Kelompok komunitas atau masyarakat menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat.

Atas dasar itu perlu suatu pengorganisasian masyarakat dalam menyikapi pembangunan desa perlu dikaji lebih lanjut. Faktor penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pembangunan desa adalah kearifan lokal. Pada kesempatan ini penulis ingin menguraikan pembangunan prasarana desa berwawasan lingkungan. Tulisan ini merujuk pada 3 buku, yaitu:

1. Gunawan S dan Ari Wulandari, Membangun Indonesia Dari Desa,
2. Roestanto Wahidi. Membangun Perdesaan Modern,
3. Richard Wayne Gnagey, Pelatihan Untuk Prasarana Desa

Penelitian ini jauh dari sempurna namun setiap kerja bergantung pada niatnya, maka uraian ini dapat digunakan melengkapi bahan kuliah Pengetahuan Lingkungan. Atas dukungan nyata yang diberikan, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu Ir Rahmi Yanita, MT sebagai Ketua Program Teknik Sipil ITI.

Serpong, 09 September 2021

Muh. Isman Tumiwa

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
Surat Tugas Penelitian	
KATA PENGANTAR	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Masalah	4
1.2 Tujuan	5
1.3 Metode Penelitian	5
BAB II PENGELOLAAN PRASARANA DESA BERWAWASAN LINGKUNGAN	6
2.1 Modernisasi Desa	7
2.2 Program Pembangunan Prasarana Perdesaan	15
2.3. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan	21
2.4 Daftar Pelatihan untuk Masyarakat,Fasilitator dan Pemerintah	23
BAB III PENUTUP	27
DAFTAR PUSTAKA	230

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan bisa dikatakan sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap lingkungan. Pembangunan sebagai wujud pengelolaan lingkungan merupakan sarana mensejahterakan manusia melalui proses pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan memanfaatkan iptek. Proses tersebut dilaksanakan secara bertahap dan sistematis berlandaskan suatu kebijaksanaan pembangunan. Kebijaksanaan pembangunan harus disusun berdasarkan apa yang akan diperbuat atau dikembangkan sesuai dengan apa yang dimiliki. Tantangan dan permasalahan yang muncul adalah kemampuan dalam mengestimasi potensi yang dimiliki dan kemampuan untuk mengurus atau mengelolanya agar bermanfaat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan keberlanjutan ekologi, ekonomi, sosial-budaya, politik, pertahanan dan keamanan

Secara singkat bisa dikatakan bahwa pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Pembangunan, dalam kehidupan sehari-hari, dapat digunakan sebagai terjemahan atau padanan istilah: development, growth and change, modernization, atau bahkan juga progress. Karena itu, kian menjadi sangat sulit untuk mendefinisikan pembangunan" dalam suatu rumusan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan, atau fungsi yang sangat beragam yang melekat pada istilah "pembangunan" itu. Sebab, pembangunan mencakup banyak makna, baik fisik maupun non-fisik, baik proses maupun tujuannya, baik yang duniawi maupun rohaniah. Pada istilah pembangunan melekat pula pengertian-pengertian: ekonomi, politik, maupun sosial dan kebudayaan. Meskipun demikian, apapun maksud, tujuan, dan makna yang terkandung dalam pengertian pembangunan, kita menyakini selalu merujuk pada sesuatu yang memiliki arah positif, lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan umat manusia secara individual maupun bagi masyarakatnya. Pemberdayaan pada

dasarnya merupakan serangkaian aktivitas untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan daya dari suatu kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang kurang berdaya. Dalam konteks masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memperkuat atau menambah daya bagi kelompok masyarakat miskin, agar dengan bertambahnya daya atau kekuatan tersebut, mereka mampu keluar dari belenggu kemiskinan. Sebagai sebuah strategi pembangunan, konsep pemberdayaan telah berkembang. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep dari strategi pembangunan ekonomi yang di dalamnya merangkum sekaligus nilai-nilai sosial yang berlaku di suatu komunitas/wilayah. Konsep ini memperlihatkan suatu cara pandang atau paradigma baru pembangunan yang bersifat "people-centered, participatory, empowering, and sustainable ,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada 15 Januari 2014 ini didasari pertimbangan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang tentang Desa disebutkan bahwa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kawasan Perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa hakikat pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa dalam pola pemberdayaan. Adapun pemberdayaan masyarakat desa diartikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya



melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Menurut Undang-Undang ini, penataan desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penataan desa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan desa bertujuan untuk: Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
- d. Meningkatkan daya saing desa.

Pada umumnya masyarakat perdesaan mengalami beberapa permasalahan di desa sebagai berikut :

1. Infrastruktur jalan yang kurang mendukung, seperti jalan yang berbatu atau becek apabila hujan, dan berdebu apabila musim kemarau.
2. Sarana air bersih masih alami
3. Karenasarana jalan yang kurang mendukung, maka kondisi transportasi menjadi penghambat akses masyarakat perdesaan terhadap perkotaan.
4. Berkurangnya sumberdaya alam yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, karena alam tidak dipelihara bahkan cenderung dibiarkan terlantar.
5. Kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai akibat dieksploitasi dan tidak dijaga kelestariannya.
6. Sarana komunikasi yang minim menyebabkan warga desa kurang bisa berkembang karena sulit mengakses informasi dari luar pedesaan.
7. Permasalahan tanah sering muncul sebagai akibat tidak diperhatikannya legalitas kepemilikan.
8. Derajat kesehatan masyarakat masih rendah. Sarana tempat berobat, biasanya hanya puskesmas pembantu dengan jumlah dan kompetensi tenaga medis yang sangat terbatas. Peran non medis sering lebih menonjol, karena dianggap lebih murah, dan percaya bahwa penyakit disebabkan oleh alam sekitar.
9. Tingkat pendidikan masyarakat umumnya masih rendah, karena sarana pendidikan yang ada hanya sampai tingkat SD atau SMP. Penduduk desa yang dapat meraih strata pendidikan lebih tinggi umumnya enggan tinggal di desa karena pekerjaan dan penghasilan di kota lebih menjanjikan.

## 1.1 Masalah

Ada azas lingkungan yang perlu dijadikan pedoman dalam menyusun metode pengelolaan lingkungan sosial. Adapun azas tersebut sistem yang mapan cenderung mengeplotir system yang belum mapan. Aplikasi azas ini merupakan keniscayaan dalam keterhubungan masyarakat lokal dengan global sehingga diperlukan kecermatan dan kearifan dalam pengelolaan lingkungan sosial dikarenakan bisa menghilangkan pengetahuan atau kearifan lokal suatu komunitas.

Implikasi dari hal ini bisa membuat pembangunan sosial tidak berkelanjutan dan bisa dipastikan kemajuan ekonomi masyarakat lokal juga tidak berlanjut, dikarenakan pengelolaannya didominasi oleh pihak eksternal yang menggunakan organisasi local.

Menurut informasi yang didapat bahwa desa di Indonesia dihadapkan pada keterbelakangan ekonomi sehingga harus dikembangkan dengan berbagai cara. Hal tersebut lebih disebabkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang selalu menggambarkan desa sebagai wilayah yang dianggap memiliki banyak kekurangan, mulai dari segi pendidikan, kesehatan, pekerjaan sampai hiburan. Faktor ini kemudian menyebabkan terjadinya urbanisasi serta hilangnya kemandirian masyarakat desa.

Denga adanya otonomi daerah, maka saatnya merubah paradigma tersebut. Desa bukan lagi menjadi ruang yang didedefisikan dengan keterbelakangan pendidikan, kemiskinan atau bahkan digambarkan sebagai subsektor yang berfungsi hanya sekedar untuk mendukung ekonomi perkotaan. Modernisasi perdesaan merupakan suatu kebutuhan , sebab perkembangan pedesaan tidak terlepas dari proses modernisasi yang dianggap mendatangkan perubahan dalam sisi ekonomi masyarakat desa. Banyak kajian dan penelitian yang menyatakan bahwa proses modernisasi merupakan faktor pengembangan dan faktor induk yang menyebabkan berkembangnya desa. Faktor utama dan yang menjadi kunci dari proses modernisasi adalah transformasi, yaitu faktor penting yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Modernisasi tidak akan terjadi jika perubahan masyarakat tidak terjadi, disini pemahaman pembangunan dari , oleh dan untuk masyarakat menjadi keharusan. .Namun, modernisasi juga bukan perubahan yang terjadi saat ini, melainkan suatu proses panjang yang menyertainya. Melihat kondisi Indonesia yang terdiri dari berbagai

etnis, agama, budaya ,maka diperlukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan .  
Bagaimana menerapkan pengelolaan tersebut dalam memodernisasi desa,  
khususnya dalam pembangunan prasarana desa

## **1.2 Tujuan**

Modernisasi adalah suatu proses transformasi besar masyarakat, suatu perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Modernisasi adalah istilah yang paling spektakuler dalam suatu masyarakat meliputi perubahan-perubahan teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern. Konsekuensi dari modernisasi antara lain bergesernya nilai dan norma dalam tatanan kehidupan dan berubahnya fungsi lembaga lembaga social. Prasarana perdesaan yang buruk menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, karena hal tersebut membatasi pertumbuhan produktif dan merintang perkembangan modal manusia (humancapital) yang berdampak pada melemahnya modal sosial Oleh karena itu pembangunan prasarana di wilayah perdesaan harus lebih berorientasi pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Pada tulisan ini akan dideskripsikan pengelolaan prasarana desa yang berwawasan lingkungan

## **1.3 Metode Penelitian**

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan sehingga diperoleh pengetahuan yang menyeluruh mengenai masalah, fenomena, dan kekuatan-kekuatan sosial yang diperoleh jika hubungan-hubungan fenomena dikaji dalam suatu periode yang lama. Dengan dasar itu dapat didefinisikan metode deskriptif berkesinambungan atau continuity descriptive research sebagai kerja meneliti secara deskriptif yang dilakukan secara terus menerus atas suatu objek penelitian. Dalam tulisan ini dilakukan dengan pendekatan tersebut. Kajian ini terdiri dari 3 bab yang diakhiri dengan bab penutup. Pada bab I , pendahuluan yang dimulai dengan permasalahan dan kebutuhan modernisasi desa yang membentuk masalah dan tujuan penulisan ini. Selanjutnya pada bab 2 diuraikan ruang lingkup pengelolaan prasarana desa berwawasan lingkungan . Pada bab penutup diuraikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kajian ini.

## **BAB II**

### **Pengelolaan Prasarana Desa Berwawasan lingkungan**

Beberapa pakar lingkungan berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya diterapkan. Pembangunan yang belum pro lingkungan berdampak pada rusaknya ekosistem. Hal ini juga kan terjadi kerusakan ekosistem pedesaan bila pembangunan prasarana desa tidak pro lingkungan. Dalam bab ini akan diuraikan suatu pendekatan pengelolaan lingkungan berkaitan penyediaan prasaran perdesaan.

Langkah strategi perencanaan pembangunan daerah, dapat dilakukan dengan cara menyinkronkan semua perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah disusun oleh pemerintah supradesa berdasarkan hasil harmonisasi RPJM yang telah disusun oleh pemerintah desa. Sehingga, desa menjadi institusi yang memiliki perencanaan sendiri (self planning) yang didasarkan pada kewenangan yang dimiliki. Pemerintah supradesa juga mampu mengintegrasikan rencana pembangunan wilayah dan sektoral berdasarkan kebutuhan desa dengan berdasarkan hasil Musrenbang desa. Hal tersebut dilakukan dengan memberi kewenangan tambahan kepada desa dan kecamatan dalam membuat perencanaan tata ruang dan wilayahnya. Dengan begitu, kelembagaan perencanaan desa dan sumber daya perangkat desa yang mampu menyusun rencana pembangunan desa perlu disiapkan; baik itu Rencana Tata Ruang Desa maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), serta dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Upaya tersebut menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua, meskipun peraturan perundang-undangan sudah begitu memadai dalam memberikan payung hukum, setelah dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 .

Konsep pembangunan yang menitikberatkan pada keberdayaan sosial masyarakat dengan pendekatan manusianya sebagai subyek pembangunan diakui ataupun tidak telah berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan manusia di Indonesia. Pergeseran paradigma pembangunan tentu juga memengaruhi pola-pola pemberdayaan masyarakat terutama yang berkaitan langsung dengan strategi pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah/daerah yang ada di Indonesia. Untuk itulah, dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang melanda masyarakat pedesaan dan seolah tak ada strategi untuk memutusnya, tentu diperlukan usaha yang luar biasa (extra ordinary). Pemerintah supradesa perlu melakukan sebuah perubahan cara berpikir agar melahirkan konsep yang dapat memicu percepatan terjadinya perbaikan kehidupan masyarakat desa. Program-program pemberdayaan masyarakat yang

berdampak terhadap perubahan paradigma pembangunan paling tidak memerlukan tiga hal:

- 1) Aspek kelembagaan sosial yang telah hidup di masyarakat juga dapat diakomodasi dalam setiap perencanaan pembangunan daerah,
- 2) Aspek budaya lokal (local community) seperti karakteristik struktur sosial maupun budaya yang melekat pada masyarakat harus dipandang sebagai kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan,
- 3) Kebijakan pembangunan yang dilahirkan oleh pemerintah tentu harus dapat adaptif dengan pola kehidupan masyarakat. Artinya, kebijakan yang dilahirkan tentu harus partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi pengelolaan anggarannya.

Diundangkan dan diberlakukannya tujuh paket perundangundangan desa, diharapkan mampu memberikan semangat bagi masyarakat desa dalam menentukan arah pembangunan desa. Dalam konsideran UU Desa disebutkan, "pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, hidup dan kehidupan masyarakat desa, yang mendiami kawasan perdesaan sebagai hajat dalam menghidupi kehidupannya". Kawasan perdesaan yang dimaksudkan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi bagi masyarakat desa.

Dalam konteks itu, maka isu kesejahteraan bagi masyarakat mencakup dua komponen besar, yakni penyediaan layanan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan) dan pengembangan ekonomi perdesaan yang berbasis pada potensi desa. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat perdesaan yang lebih optimal tentu tidak mungkin mampu dicakup oleh pemerintah supradesa semata. Karena itu, dibutuhkan juga dukungan dari pihak masyarakat dan juga pemerintah desa sebagai subyek daripada pembangunan perdesaan. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah juga sangat diperlukan, terutama dalam mendukung suksesnya program-program yang berbasis pada percepatan penanggulangan kemiskinan. Agar mampu mewujudkan hal itu, perbaikan pada pemenuhan layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal melalui jalur pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan merupakan langkah maju, dan perlu terus didorong oleh semua pihak. Termasuk dunia usaha/pelaku usaha untuk terus melibatkan masyarakat yang tergabung dalam rumah tangga miskin (RTM). Pemerintah supradesa perlu memosisikan diri untuk terus mengupayakan dan menggalakkan, serta memfasilitasi proses-proses tersebut, dengan memberikan berbagai bantuan sosial sehingga dapat tercipta "modal sosial bagi masyarakat perdesaan untuk menjalankan usaha yang dirintis, sesuai dengan bidang usaha yang digelutinya. Dengan begitu, pemerintah daerah lebih berperan sebagai facilitating dan enabling sehingga peran tersebut dapat memungkinkan masyarakat

untuk berperan aktif sebagai pelaku sosial ekonomi dalam pembangunan. Pada akhirnya masyarakat mampu melakukan sendiri pengembangan dan perubahan

## **2.1 Modernisasi Desa**

Untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, di wilayah perdesaan perlu diciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, yang lebih menarik selain bergerak di bidang pertanian. Jika pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sebanyak 255,46 juta jiwa, dan 46,7% diantaranya tinggal di wilayah perdesaan, maka berarti terdapat lebih dari 119 juta orang di perdesaan yang belum menikmati infrastruktur yang lebih layak. Selanjutnya subab ini mengacu pada buku Membangun Perdesaan Modern Modernisasi halaman 13 sampai 19.

Pembangunan prasarana di perdesaan harus diprioritaskan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih variatif. Pembangunan yang berbasis perdesaan diperlukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Dalam realisasinya, pembangunan perdesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke perdesaan, sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Oleh karena itu, infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Skala prioritas pembangunan perdesaan yang berbasis pada pengembangan perdesaan (rural based development), meliputi:

1. Pengembangan ekonomi lokal;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pembangunan prasarana dan sarana; dan
4. Pengembangan kelembagaan.

Ada dua sisi pandang untuk menelaah pembangunan perdesaan, yaitu:

1. Pembangunan perdesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan (intervensi) dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
2. Pembangunan perdesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan perdesaan.

Model intervensi terhadap proses pembangunan perdesaan selama ini bertumpu pada pandangan yang menganggap bahwa pengkotaan perdesaan (rural urbanization) pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagai kesatuan ekonomi dan kawasan serta pengembangan kegiatan pertanian secara modern melalui mekanisasi dan industrialisasi pertanian dan penerapan standar pelayanan minimum yang sama antara desa dan kota.

Dalam intervensi pembangunan perdesaan digunakan analisis terhadap anatomi desa sehingga tidak kontra produktif dalam merealisasikan pembangunan perdesaan. Anatomi tersebut mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial-budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan permukiman sehingga dalam pembangunan perdesaan berlandaskan pada kearifan lokal.

Untuk itu, beberapa pakar pembangunan perdesaan membagi tipologi desa ke dalam empat kategori, yaitu:

- a. Desa pantai, yaitu desa yang kegiatan utama penduduknya berupa usaha penangkapan ikan.
- b. Desa persawahan, yaitu desa yang mayoritas penggunaan lahannya untuk persawahan terutama tergantung pada produktivitas penanaman padi.
- c. Desa perkebunan, yaitu desa yang mayoritas penggunaan lahannya untuk produksi tanaman perkebunan.
- d. Desa perladangan, yaitu desa yang kegiatan utama penduduknya adalah perladangan (menanam tanaman pangan tadah hujan dan palawija).

Berdasarkan kriteria Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D), tipologi desa dibagi ke dalam enam tipe menurut kegiatan ekonominya, yaitu desa industri, desa pertanian tanaman pangan, desa perkebunan, desa perikanan, desa pariwisata atau jasa, dan desa peternakan.

Apabila komponen utama dari aktivitas ekonomi suatu desa telah diketahui, maka kebijakan dan perencanaan pembangunan desa dapat disesuaikan dengan tipologi desa tersebut. Pembangunan desa yang terfokus pada kegiatan ekonomi desa diharapkan dapat memberikan dampak yang luas, seperti perluasan lapangan kerja, investasi, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Selain itu diharapkan terjadinya keterkaitan ke belakang dan ke depan (backward dan forward linkages) baik antar desa maupun antara desa dengan kota. Lebih lanjut diharapkan adanya perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat desa dan sekaligus dapat mengatasi kemiskinan masyarakat desa.

Membangun perdesaan identik dengan modernisasi desa, yaitu proses mengubah kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa lebih mendekati kondisi sosial-ekonomi masyarakat kota. Dampak dari perubahan tersebut antara lain bergesernya homogenitas masyarakat menjadi masyarakat yang lebih seperti karakteristik masyarakat perkotaan. Desa juga mengalami dinamika sosial yang lebih cepat akibat

faktor teknologi dan informasi. Namun secara administratif, desa tetap desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Perubahan desa menjadi kota lebih disebabkan karena masyarakat mengalami perubahan yang dikenal dengan istilah berproses. Masyarakat senantiasa berubah di semua tingkat kompleksitas internalnya. Di tingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik dan kultur. Di tingkat mikro terjadi perubahan kelompok, komunitas dan perilaku individual. Konsekuensi dari perubahan sosial itu adalah terjadinya proses transformasi nilai yang sering disebut dengan modernisasi.

Perubahan sosial perdesaan terjadi hampir di seluruh perdesaan di Indonesia, terutama perdesaan dengan basis pertanian padi sawah. Pada perdesaan-perdesaan ini ketergantungan terhadap pihak luar semakin besar, terutama kepada pemerintah dan pasar. Hanya sedikit dari pedesaan di Indonesia yang masih bertahan dengan sistem ini dan cenderung membatasi diri dari tekanan modernisasi.

Pada umumnya, desa di Indonesia memiliki ciri-ciri yang homogen dan natural. Desa memiliki jumlah penduduk yang terbatas, interaksi yang intensif, ikatan emosional yang kuat serta memiliki pola pikir yang tidak integritas. Penduduk desa memiliki daya ikat tersendiri, terutama ikatan kekeluargaan. Desa memiliki lembaga-lembaga sosial yang ikut berperan sebagai fasilitator untuk kemajemukan yang mereka miliki. Sebagian besar masyarakat desa di Indonesia dihadapkan pada keterbelakangan ekonomi sehingga harus dikembangkan dengan berbagai cara. Hal tersebut lebih disebabkan oleh mainstream masyarakat Indonesia yang selalu menggambarkan desa sebagai wilayah yang dianggap memiliki banyak , mulai dari segi pendidikan, kesehatan, pekerjaan sampai hiburan. Faktor ini kemudian menyebabkan terjadinya urbanisasi serta hilangnya kemandirian masyarakat desa. Pola pembangunan di Indonesia cenderung menilai desa sebagai penopang daerah perkotaan, sehingga desa menjadi pusat lumbung bagi masyarakat kota.

Ciri lain dari desa selalu dikaitkan dengan petani dan padi, meskipun lahan pertanian di desa tersebut sudah sangat sempit. Hal ini yang mengidentikan desa dengan pekerjaan pertanian, padahal saat ini tidak semua desa memiliki lahan pertanian yang memadai untuk beraktivitas para petani. Petani dan padi selalu menjadi simbol perdesaan. Petani adalah penghuni desa, dan padi merupakan tanaman pokok yang selalu dikembangkan sebagai komoditas unggulan. Sudah saatnya merubah paradigma tersebut. Desa bukan lagi menjadi teritorial yang didefinisikan dengan keterbelakangan pendidikan, kemiskinan atau bahkan digambarkan sebagai subsektor yang berfungsi hanya sekedar untuk mendukung ekonomi perkotaan. Modernisasi perdesaan bukan hal yang tabu lagi, sebab perkembangan pedesaan tidak terlepas dari proses modernisasi yang dianggap mendatangkan perubahan dalam sisi ekonomi masyarakat desa. Banyak kajian dan penelitian yang menyatakan bahwa proses modernisasi merupakan faktor pengembangan dan faktor induk yang menyebabkan berkembangnya



desa. Kunci dari proses modernisasi adalah transformasi, yaitu faktor penting yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Modernisasi tidak akan terjadi jika perubahan masyarakat tidak terjadi. Namun, modernisasi juga bukan perubahan yang terjadi saat ini, melainkan suatu proses panjang yang menyertainya. Menurut sejarahnya, modernisasi merupakan proses perubahan menuju tipe sistem sosial, ekonomi dan politik yang berkembang di Eropa dan Amerika Utara dari abad ke-19 dan ke-20, kemudian meluas ke negara-negara Amerika Selatan, dan Afrika. Modernisasi memang lebih cepat dibanding proses evolusi, namun proses modernisasi suatu masyarakat membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan segala.

Para ahli membagi modernisasi atas beberapa tingkatan, yaitu:

1. Modernisasi tingkat alat,
2. Modernisasi tingkat lembaga,
3. Modernisasi tingkat individu,
4. Modernisasi tingkat inovasi

Transformasi yang dianggap radikal dikaitkan dengan bangkitnya jenis-jenis produksi industri mekanis dan besar, penghapusan kerja berbasis agraria yang berkaitan dengan tanah, serta penghancuran komunitas desa yang dikenal terjalin kuat. Semua itu merupakan perubahan besar sebagai konsekuensi dari modernisasi.

Modernisasi adalah suatu proses transformasi besar masyarakat, suatu perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Modernisasi adalah istilah yang paling spektakuler dalam suatu masyarakat meliputi perubahan-perubahan teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern. Konsekuensi dari modernisasi antara

lain:

a. Bergesernya nilai dan norma dalam tatanan kehidupan

Nilai dan norma masyarakat desa akan bergeser ketika pola pikir masyarakat desa yang sebelumnya sangat dengan pola keagamaan beralih pada rasionalitas yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan dan transformasi media serta interaksi dengan masyarakat sekitar. Akibatnya terjadi perubahan gaya hidup masyarakat di pedesaan. Gaya yang identik dengan sakral berganti dengan rasionalisasi, dan hal-hal yang gaib tergeser Oleh adanya kenyataan yang ditampilkan oleh rasio.

b. Berubahnya fungsi lembaga lembaga sosial

Pada mulanya lembaga di desa berfungsi sebagai mediator kepentingan masyarakat dengan alam, masyarakat dengan leluhur dan antar mereka sendiri. Berlangsungnya proses modernisasi menjadikan lembaga-lembaga sosial itu Sebagai penyalur aspirasi dari elite desa maupun tokoh yang berpengaruh di desa. Dengan demikian, fungsi yang tadinya sebagai mediator berubah menjadi pragmatis dengan atribut kepentingan individu maupun kelompok yang dominan di desa.

c. Berubahnya nilai fungsi lahan desa

Faktor yang cukup dominan mengalami perubahan adalah beralihnya fungsi lahan di pedesaan, yang sebelumnya berfungsi untuk tanaman pertanian kini lebih banyak

dikelola sebagai lahan industri maupun tanaman industri. Kondisi lahan seperti ini banyak terjadi akibat letak geografis desa yang dekat dengan kota sehingga lahan yang asal mulanya sebagai sumber penghidupan bergeser menjadi sumber lahan untuk pengolahan. Pabrik atau industri bahan baku banyak dikembangkan di lahan pertanian dengan perhitungan lebih murah bila dibandingkan dengan lahan di perkotaan. Selain itu tanaman industri juga ikut merubah corak fungsi lahan yang sebelumnya mengaitkan banyak pihak di desa menjadi sebuah konsorsium yang diikat dengan perjanjian yang sangat kaku. Dengan menyempitnya lahan-lahan pertanian di pedesaan, masyarakat desa berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Banyak petani kemudian beralih menjadi buruh pabrik, buruh industri, bahkan pedagang yang lokasi bekerjanya di luar desa tempat dimana mereka tinggal.

d. Berubahnya pola okupasi masyarakat desa

Sebagai konsekuensi modernisasi bagi masyarakat desa, bahwa tatanan yang pernah mengatur mereka dalam pola kehidupan masyarakat desa berubah menjadi tatanan yang diatur oleh kebutuhan.

Modernisasi bukan sesuatu yang tabu dan keliru untuk dikembangkan. Pada hakikatnya modernisasi lebih menunjuk pada suatu transformasi dalam kerangka pencapaian kesejahteraan kehidupan manusia, kemudian dapat mengambil hal-hal yang berfungsi positif dan dapat mengevaluasi dampak yang bersifat negatif bagi kehidupan. Modernisasi desa merupakan proses yang secara sengaja mentransformasikan segala bentuk perubahan yang bersifat kompleks untuk membentuk atau menyempurnakan kehidupan pada masyarakat desa. Contohnya pola pertanian di desa yang sebelumnya sangat terantung pada alam dapat mengalami peningkatan dan dapat dirubah dengan teknologi. Pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan desa terbukti mampu meningkatkan produksi pangan dan mempermudah distribusi produk pertanian. Mekanisasi pengolahan tanah dengan traktor, penemuan benih/bibit unggul tanaman dan

ternak, penggunaan pupuk organik dan anorganik, aplikasi mesin - mesin pengolahan hasil pertanian dan sebagainya yang semuanya merupakan produk modernisasi telah terbukti mampu meningkatkan produksi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan. Kemudian belakangan ini, penggunaan jaringan internet dan media sosial lainnya yang dikembangkan di perdesaan telah membantu pemasaran hasil pertanian lebih fleksibel. Modernisasi desa bukan berarti menghancurkan atau menghilangkan apa yang telah ada sebelumnya dan mengganti dengan sesuatu yang baru, namun mengkolaborasikan yang ada sebelumnya dengan sesuatu yang baru yang lebih efisien dan berhasil guna.

Membangun dan memperbaiki tata kelola infrastruktur desa merupakan salah satu proses modernisasi perdesaan. Upaya ini membutuhkan kepedulian dan dukungan semua pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Konsepnya adalah "memberi pancing bukan memberi ikan". Bantuan yang diberikan pemerintah dan pihak- pihak lain hanya merupakan stimulan, selebihnya adalah pemberdayaan masyarakat pedesaan itu sendiri. Selanjutnya pada subbab dibawah ini akan diuraikan kegiatan pembangunan infrastruktur desa(PPIP) yang mengacu pada bab 2 dan bab 3 buku Membangun Pedesaan Modern ( Roestanto,2015)

## **2.2 Program Pembangunan Prasarana Pedesaan**

Infrastruktur adalah bagian dari modal suatu negara, yaitu biaya tetap sosial yang langsung

mendukung produksi. Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai eara baik seera langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur tidak hanya merupakan kegiatan produksi yang akan menciptakan output dan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur juga memengaruhi efisiensi dan kelanearan kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya.

Para ahli sosial mengatakan, bahwa adanya infrastruktur ekonomi yang memadai merupakan prakondisi bagi tumbuh kembangnya kegiatan agribisnis dan perekonomian seera umum di pedesaan. Infrastruktur esensial bagi agribisnis dan perekonomian pedesaan seera umum meneakup sistem pengairan, pasar, komoditas pertanian, jalan raya, kelistrikan, dan jaringan telekomunikasi.

Infrastruktur dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan aset fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi public utilities (energi, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public work (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan drainase), serta sektor transportasi (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi pendidikan,kesehata,perumahan dan rekreasi .
3. Infrastruktur administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

Infrastruktur juga dapat digolongkan menjadi infrastruktur dasar dan pelengkap.

1. Infrastruktur dasar (basic infrastructure), meliputi sektor- sektor yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan (non tradable), dan tidak dapat dipisah-pisahkan baik secara teknis maupun spasial. Contohnya jalan raya, rel kereta api, pelabuhan laut, drainase, bendungan, dan sebagainya.
2. Infrastruktur pelengkap antara lain gas, listrik, telepon dan pengadaan air minum.

Infrastruktur dasar biasanya diselenggarakan oleh pernerintah, karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Namun dalam penyediaannya pemerintah dapat bekerja sarna dengan badan usaha sesuai dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Perbedaan antara infrastruktur dasar dan pelengkap tidak selalu sama dan dapat berubah menurut waktu. Misalnya pengadaan air minum yang digolongkan sebagai infrastruktur pelengkap, digolongkan sebagai infrastruktur dasar. Fasilitas infrastruktur bukan hanya berfungsi melayani berbagai kepentingan umum, tetapi juga memegang peranan penting pada kegiatan-kegiatan swasta di bidang ekonomi. Kebutuhan prasarana merupakan pilihan (preference), dimana tidak ada standar umum untuk menentukan berapa besarnya fasilitas yang tepat di suatu daerah atau populasi. Dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat perdesaan, Pemerintah meluncurkan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Program ini merupakan bagian dari PNPM Mandiri yang dikhususkan bagi wilayah perdesaan di seluruh Indonesia.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan. Tujuannya yaitu:

1. Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) berupaya menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, baik secara individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan desa, sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Tujuan jangka menengah adalah:
  - a. Meningkatkan akses masyarakat miskin dan yang mendekati miskin ke infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Kegiatan PPIP lebih difokuskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perdesaan, khususnya jalan, jembatan, irigasi, air minum dan sanitasi.
  - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur perdesaan. Kegiatan PPIP diharapkan dapat memberikan peluang dan mendorong inisiatif serta peran aktif masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di perdesaan untuk membuat perencanaan sekaligus mengelola pelaksanaan kegiatannya dengan bantuan pemerintah yang dialokasikan ke setiap desa.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari PPIP adalah:

1. Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatnya kemampuan masyarakat perdesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur perdesaan.
3. Meningkatnya jumlah penanganan desa tertinggal.
4. Meningkatnya kemampuan aparat pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan di perdesaan.
5. Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan peran stakeholder, pelaksanaan PPIP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kepekaan dan kesadaran di semua tingkatan melalui pelaksanaan *Public Awareness Campaign (PAC)* yang optimal;
2. Peningkatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan yang akan diintegrasikan ke dalam sistem penyelenggaraan program;
3. Pemantauan kinerja yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat terendah di desa;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program, khususnya peran serta perempuan dan kelompok masyarakat miskin, terutama dalam proses pengambilan keputusan;
5. Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan sistem, penghargaan dan sanksi bagi penyelenggara program, dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat desa berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan program;
6. Penguatan mekanisme serta implementasi penanganan pengaduan.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat (*acceptable*). Penyelenggaraan PPIP harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa yang menjadi prioritas sasaran kegiatan PPIP. Penyelenggaraan PPIP harus melibatkan fungsi partisipasi masyarakat yang turut mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga- lembaga perwakilan yang sah, yang dijadikan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa.
- b. Dilaksanakan masyarakat secara terbuka (*transparent*). Kegiatan PPIP harus transparan. Harus ada kesepakatan bersama atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses di pemerintahan, mulai dari lembaga pemerintahan daerah hingga lembaga pemerintahan desa harus saling berkomunikasi dengan lembaga-lembaga masyarakat di desa sehingga implementasi PPIP tidak dimaknai sebagai proyek sepihak. Transparansi ini harus dimulai dari tingkat sosialisasi desa, rembuk warga, hingga ke tahapan musyawarah desa yang kemudian disusul dengan penyiapan dan mobilisasi warga pada tahap pelaksanaan fisiknya.
- c. Dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). Penyelenggaraan PPIP harus dapat dipertanggung- jawabkan, baik kepada masyarakat sebagai sasaran akses kegiatan maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan PPIP akan menjadi penentu bagi para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi -organisasi yang terlibat.
- d. Memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Manfaat dari penyelenggaraan PPIP harus dirasakan oleh masyarakat desa secara berkelanjutan, bukan hanya memberi manfaat sesaat. Dari pengalaman banyak proyek fisik, masyarakat sering mengabaikan pemeliharaan proyek tersebut dengan

anggapan proyek tersebut milik pemerintah, dibangun oleh pemerintah, maka pemerintah pula yang berkewajiban memeliharanya. Oleh karena itu perlu dibentuk Kelompok Pemanfaatan dan pemeliharaan (KPP). Tim ini merupakan institusi yang dibentuk di tingkat masyarakat sebagai puma kegiatan PPIP. Tim ini bertugas menjaga dan memelihara infrastruktur yang dihasilkan kegiatan PPIP sehingga secara terus-menerus memberi manfaat bagi masyarakat desa.

Agar prinsip-prinsip penyelenggaraan PPIP dapat dimanifestasikan dengan baik, maka diperlukan

pendekatan sebagai berikut: Pemberdayaan,Keberpihakan kepada masyarakat miskin,Otonomi dan

desentralisasi, Partisipatif,Keswadayaan,Keterpaduan program pembangunan,Penguatan kapasitas kelembagaan.

Ruang lingkup kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan (PPIP) meliputi:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan untuk mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan perdesaan, titian dan tambatan perahu;
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan;
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, dan sanitasi perdesaan.

Adapun pola pelaksanaan PPIP adalah sebagai berikut:

1. Program ini dilaksanakan oleh masyarakat desa sasaran secara swakelola melalui organisasi masyarakat setempat sebagai pengelola kegiatan.
2. Penetapan jenis infrastruktur, perencanaan dan operasi pemeliharanya dilaksanakan dalam Musyawarah Desa. Selama pelaksanaan di tingkat desa dilakukan pendampingan oleh fasilitator (konsultan).
3. Tahapan pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) adalah sebagai berikut:

#### **1. Persiapan**

Desa sasaran PPIP setiap tahunnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum sebagai hasil kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Persiapan pelaksanaan PPIP merupakan penyiapan dan mobilisasi masyarakat yang terdiri atas:

- a. Rembug penyiapan warga;
- b. Sosialisasi desa;

- c. Musyawarah Desa I/Pembentukan Organisasi
- d. Masyarakat (OMS), Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan pemilihan Kader Desa (KD);
- e. Penandatanganan Pakta Integritas.

## **2. Perencanaan Partisipatif**

Tahapan ini merupakan proses penyusunan rencana kegiatan dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhannya, memberikan gagasan, pengambilan keputusan, dan penyusunan rencana program. Perencanaan dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat dengan didampingi fasilitator. Pada tahapan ini, pemerintah daerah berperan sebagai pendorong dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Perencanaan partisipatif terdiri atas:

- a. Survei kampung sendiri;
- b. Pemetaan kemiskinan;
- c. Musyawarah Desa II;
- d. Penyusunan usulan Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
- e. Verifikasi RKM;
- f. Finalisasi RKM;
- g. Rencana teknis dan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

## **3. Pelaksanaan Kegiatan Fisik**

Pelaksanaan kegiatan fisik infrastruktur perdesaan dimulai setelah penandatanganan kontrak antara OMS dengan Satuan Kerja (Satker) PPIP Kabupaten. Proses pelaksanaan fisik meliputi beberapa kegiatan seperti penyiapan lokasi, pengadaan material, pelaksanaan konstruksi, pengadaan barang, sewa alat, serta pengendalian tenaga kerja, pengendalian waktu pelaksanaan dan pengendalian pengeluaran dana. Selama pelaksanaan fisik berlangsung, OMS harus menyampaikan informasi status pelaksanaannya dengan membuat Papan Informasi atau melaporkannya dalam rembuk desa yang diselenggarakan secara rutin. Kegiatan-kegiatan dalam tahapan pelaksanaan fisik PPIP ini meliputi:

- a. Musyawarah Desa III;
- b. Kontrak kerja;
- c. Pelaksanaan fisik;
- d. Pengawasan;
- e. Pelaporan kegiatan;
- f. Rembuk warga pelaksanaan kegiatan.

## **4. Pasca Pelaksanaan Kegiatan Fisik**

Selesai pelaksanaan kegiatan fisik dilakukan serah terima pekerjaan dari Organisasi Masyarakat (OMS) kepada Satker PPIP Kabupaten. Dari Satker Kabupaten, infrastruktur fisik yang telah dikerjakan diserahkan kepada pemerintah desa untuk

dimanfaatkan, dikelola, dan dilestarikan oleh masyarakat atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), yang dilanjutkan dengan pengendalian.

Tahapan pasca pelaksanaan kegiatan fisik PPIP ini meliputi:

- a. Musyawarah Desa IV
- b. Serah terima sarana fisik /infrastruktur
- c. Operasi dan pemeliharaan

Secara ringkas, tahapan pelaksanaan di tingkat desa Program Ppembangunan Infrastruktur Perdesaan PPIP ini dapat disajikan dalam skema berikut

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan program pemerintah yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Cipta Karya) atas kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat di bawah payung PNPM Mandiri, yang komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat.

Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, partisipasi masyarakat merupakan kekuatan utama. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan salah satu program untuk mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang diluncurkan sejak tahun 2006. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di wilayah perdesaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur perdesaan.

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip tersebut di atas, PPIP diarahkan untuk mencakup kegiatan- kegiatan berikut:

1. Peningkatan infrastruktur pendukung aksesibilitas, yaitu jalan dan jembatan perdesaan;
2. Peningkatan infrastruktur pendukung produksi pangan, yaitu irigasi perdesaan; dan
3. Peningkatan infrastruktur pendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan.

Pada tahun 2012, PPIP menjadi program primadona dengan total anggaran mencapai Rp14,8 triliun. Jumlah desa sasaran sebanyak 7.400 desa yang terdiri atas:

- a. Desa lanjutan APBN-P 2011, sebanyak 2.400 desa;
- b. Desa regular sebanyak 1.000 desa;
- c. Desa SKP A (Surat Kuasa Pengguna Anggaran) sebanyak 1.000desa; dan
- d. Tambahan dari APBN-P 2012 sebanyak 3.000 desa.

Melalui PPIP, dana bantuan yang bisa diperoleh sebesar Rp250 juta untuk setiap desa yang terpilih dengan memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan tergantung hasil kesepakatan.



Pembangunan prasarana jalan perdesaan harus mempertimbangkan kriteria umum sebagai berikut:

1. Lahan untuk ruang milik jalan telah tersedia.
2. Berorientasi pada pengembangan wilayah dan dapat berperan untuk membuka isolasi desa Galan poros/ penghubung desa).
3. Menghubungkan pusat kegiatan (pasar, Tempat Pelelangan Ikan, sentra produksi) ke outlet Galan poros desa lain/jalan dengan fungsi lebih/sungai/laut/ feri).
4. Jalan yang akan memberikan kemudahan akses ke sarana kesehatan dan sarana pendidikan (terutama untuk perempuan hamil, orang berkebutuhan khusus, anak-anak, dan lanjut usia).
5. Memenuhi standar teknis infrastruktur jalan dan jembatan perdesaan.
6. Disain teknis yang memperhatikan masalah gender, misalnya fitur-fitur yang meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna infrastruktur.
7. Harus fungsional.
8. Dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat miskin dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Landasan teknis untuk seleksi atau prioritas adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan dan prioritas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk jalan, jembatan, dan tambatan telah ditetapkan dengan baik (misalnya kebutuhan untuk akses ke pasar atau yang lebih penting akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan).
2. Masyarakat telah membahas dan menyetujui pada prioritas kriteria (misalnya nilai ekonomis tinggi dari layanan harus menjadi salah satu kriteria, tetapi tidak menjadi satu-satunya kriteria dalam prioritas).
3. Desain teknis harus berisi fitur yang memperhatikan masalah gender, misalnya penyediaan lampu untuk meningkatkan keselamatan pengguna fasilitas, terutama perempuan dan anak-anak).
4. Konstruksi sederhana dengan mempertimbangkan sumber-daya setempat (tenaga kerja, bahan, peralat dan teknologi) dan dapat dilaksanakan serta dipelihara oleh OMS dan KPP.

Jenis konstruksi jalan yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui PPIP:

- a. Jalan tanah yang dipadatkan;
- b. Jalan dengan Lapis Pasir-Batu/Kerikil (Sirtu);
- c. Jalan dengan Lapis Telford;
- d. Jalan dengan Laburan Aspal (Buras);

e. Jalan dengan Lapis Penetrasi Makadam (Lapen).

Untuk jenis konstruksi jalan selain dari yang telah disebutkan di atas, diperlukan konsultasi lebih detail dengan Tim Pelaksana Kabupaten. [alan desa yang dibangun harus dilengkapi dengan drainase (saluran tepi/gorong-gorong/got).

Pembangunan infrastruktur jalan perdesaan dapat berupa pilihan lain dan tidak terbatas hanya pada pilihan di atas, namun tidak diperkenankan jalan aspal hotmix. Perkerasan jalan dengan alat berat juga harus diminimalkan penggunaannya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jalan baru antara lain:

1. Trase jalan mudah untuk dibuat;
2. Pengerjaan tanahnya relatif cepat dan murah;
3. Tidak banyak bangunan tambahan (jembatan, gorong-gorong, dan lain-lain);
4. Pembebasan tanah tidak sulit;
5. Tidak akan merusak lingkungan.

Adapun yang perlu diperhatikan dalam peningkatan jalan lama antara lain:

1. Lokasi memungkinkan untuk pelebaran jalan;
2. Geometri jalan harus disesuaikan dengan syarat teknis;
3. Tanjakan yang melampaui batas harus diubah sesuai syarat teknis;
4. Sistem drainase dan pekerjaan tanah tidak akan merusak lingkungan.

Pada petunjuk pelaksanaan pembangunan prasarana pedesaan, asas pemilihan teknologi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan tenaga kerja setempat dengan jumlah yang banyak.
2. Mengutamakan penggunaan bahan setempat.
3. Membangun prasarana yang sederhana, agar dapat dikerjakan oleh masyarakat setempat tanpa mendatangkan tenaga ahli atau peralatan dari luar.
4. Membangun prasarana yang bermutu, sesuai dengan spesifikasi dan penjelasan yang ada dibuku Petunjuk Teknis.
5. Mencari harga yang relatif murah, agar dapat membangun prasarana yang lebih banyak mengingat kebutuhan prasarana jauh di atas biaya yang tersedia.
6. Aparat PPK tidak terpaku pada standar yang ada di buku petunjuk teknis, namun dapat danberhak untuk memilih teknologi lain dengan catatan masih sesuai dengan kriteria PPK.
7. Larangan yang ada pad a petunjuk teknis diperuntukkan bagi masalah yang dianggap kurang sesuai dengan kriteria, terlalu mewah, yang di luar kemampuan. Contohnya adalah batasan-batasan dalam penggunaan jembatan beton atau permukaan aspal saja.
8. Masukan teknis dapat diterima dari banyak sumber termasuk konsultan pendamping, koordinator wilayah, konsultan inti, aparat proyek maupun dari luar.

Pembangunan jalan di daerah pedesaan selain perlu memperhatikan aspek teknis konstruksi jalan, juga perlu memperhatikan aspek konservasi tanah mengingat kondisi wilayah dengan topografi yang berbukit dan tanah yang peka erosi. Tidak sedikit erosi tanah berasal dari jalan, khususnya berupa longsoran dari tanggapan dan tebing jalan.

Tujuan dari pengendalian erosi pada jalan adalah untuk mengamankan jalan dan membangun jalan yang tidak menjadi sumber erosi.

Pemilihan trase jalan untuk mengurangi masalah lingkungan perlu dilakukan, misalnya dengan mengurangi galian dan timbunan bilamana mungkin. Alasannya, karena tidak mungkin di daerah perbukitan menghilangkan masalah erosi dengan pemilihan trase (misal dengan pemindahan trase atau mengurangi tanjakan). Contoh solusi untuk kawasan perbukitan dalam hal pengendalian erosi, misalnya dengan pembangunan tembok penahan tanah dan bronjong atau penanaman bahan-bahan vegetatif untuk menstabilkan lereng atau mengurangi erosi alur kecil (erosi percik).

### 2.3 Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan fundamental dari paradigma pembangunan konvensional, yaitu:

*Pertama*, pembangunan berkelanjutan mengubah perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang. Pembangunan konvensional biasanya mengejar keuntungan jangka pendek yang dilakukan lewat *eksploitasi* sumber daya alam secara intensif. Hutan ditebang untuk diekspor dan menghasilkan pemasukan keuangan dalam waktu singkat. Namun keuntungan itu akan hanya bertahan sebentar dan tidak berkelanjutan. Padahal hutan memiliki potensi manfaat yang besar dalam jangka panjang. Kulit pohon, buah-buahan, daun, akar, dan organisme-mikro yang hidup dalam hutan buatan memiliki potensi pendapatan yang tinggi jika diperkaya oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bukan eksploitasi, melainkan pengayaan sumber daya alamlah yang akan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, serta secara bersamaan meniadakan de dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya hayati yang dapat bertahan dalam jangka waktu lama, dan dengan demikian lebih cocok untuk perspektif pembangunan jangka panjang dibandingkan dengan eksploitasi sumber daya alam yang membawa manfaat dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang merusak lingkungan.

*Kedua*, pembangunan berkelanjutan memperlemah posisi dominan aspek ekonomi dan menempatkannya pada tingkat yang sama dengan pembangunan sosial dan lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk telah menimbulkan berbagai isu pembangunan sosial yang menjadi kendali bagi perolehan mandaat dari pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan penambahan kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan makanan, pekerjaan, infrastruktur, dan perumahan. Perpindahan penduduk secara horizontal maupun vertikal meningkatkan potensi konflik sosial yang didorong oleh perbedaan ras, suku, agama, status sosial, tingkat pendapatan, dan ideologi politik.

Degradasi dan kerusakan lingkungan telah semakin parah. Sumber daya alam musnah, rusak, hancur atau tercemar. Pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan dan

teknologi baru membutuhkan eksploitasi sumber daya dalam jumlah yang lebih banyak lagi, sehingga konsumsi sumber daya alam bertambah dan meningkatkan polusi serta berdampak negatif bagi pembangunan. Dampak negatif gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil untuk energi mulai terasa dengan adanya pemanasan global, perubahan iklim, dan kenaikan permukaan laut. Negara kepulauan di samudra pasifik seperti Kiribari, Vanuatu, dan Kepulauan Marshall kini telah menderita karena kenaikan permukaan laut yang cukup serius, sehingga rakyatnya mesti menjadi pengungsi musiman yang terpaksa pindah ke pulau-pulau yang lebih aman selama musim hujan. Berdasarkan contoh-contoh itu, penting bahwa pembangunan ekonomi harus ditempatkan di bawah faktor-faktor sosial dan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

*Ketiga*, kini skala preferensi individu menjadi indikator yang menentukan barang apa yang akan diproduksi dan lewat metode alokasi sumber daya seefisien mungkin. Permintaan barang oleh sebagian individu didukung oleh pendapatan yang tinggi dan daya beli. Kepentingan ini seringkali jauh lebih berkuasa dibandingkan kepentingan publik. Sebagai contoh, transportasi publik kalah bersaing dengan transportasi pribadi. Ruang publik bagi masyarakat harus tersisih oleh bangunan komersial untuk bisnis. Penyakit masyarakat, seperti tuberkulosis, diare, dan malaria, gagal menarik dana penelitian dan perhatian para peneliti yang lebih memilih meneliti penyakit rumit sesuai kebutuhan pihak-pihak yang memiliki kemampuan finansial yang kuat. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan memerlukan perubahan kebijakan secara fundamental agar kepentingan publik dapat ditempatkan di atas kepentingan pribadi; caranya adalah dengan menggunakan instrumen fiskal dan moneter yang tepat dalam sebuah kerangka kebijakan yang lebih kondusif.

*Keempat*, pasar telah gagal menangkap sinyal sosial dan lingkungan melalui mekanisme harga. Biaya sosial tidak diperhitungkan dalam harga pasar. Biaya konflik sosial berupa korban, penderitaan manusia, dan kematian tidak ditangkap oleh pasar. Hal yang sama berlaku untuk lingkungan. Deplesi sumber daya tambang dan bahan bakar fosil yang tak terbarukan tidak tercermin dalam biaya depresiasi. Polusi yang mempengaruhi kesehatan manusia, penyakit, dan bahkan kematian adalah eksternalitas negatif yang tidak diinternalisasi dalam struktur biaya. Bencana yang menghancurkan modal alam tidak diperhitungkan dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Malah upaya rehabilitasi pascabencana dihitung sebagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan, dan dengan demikian memberikan kontribusi pada peningkatan PDB. Hal ini menyiratkan bahwa bencana alam adalah penggerak ekonomi yang penting dalam “meningkatkan” pendapatan nasional. Ini jelas tidak dapat diterima; pembangunan berkelanjutan harus mengoreksi kegagalan pasar dan menginternalkan semua biaya eksternal yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan lingkungan. Gagasannya di sini bukanlah untuk “menetapkan harga yang diinginkan” tapi untuk “menetapkan harga yang tepat”

*Kelima*, pemerintah bisa dan harus mengoreksi kegagalan pasar lewat kebijakan yang tepat. Hal ini membutuhkan komitmen pemerintah secara penuh untuk melayani kepentingan masyarakat dan lingkungan. Namun, para pejabat dalam pemerintahan dipilih melalui proses demokratis yang sarat pengaruh kekuatan politik. Di negara-negara berkembang yang pendapatan masyarakatnya rendah namun kegiatan kampanye politiknya mahal, kolusi antara pejabat pemerintah, partai politik, dan konglomerat bisnis menjadi realitas yang banyak ditemui. Itu membuat pemerintah agak lemah dan enggan untuk menghadapi kekuatan perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang yang memiliki uang, senjata, dan kekuatan fisik. Sebenarnya ini berarti bahwa pemerintah, khususnya di "negara yang lemah" (*soft states*) adalah bagian dari masalah, Karena ketidakmampuannya mengoreksi kegagalan pasar. Pembangunan berkelanjutan memerlukan sistem *checks and balances* yang didukung oleh kemitraan tiga sisi yang setara antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil, yang secara bersama-sama dapat melakukan koreksi terhadap pasar serta memperbaiki kondisi kegagalan pemerintahan. Singkatnya, pembangunan berkelanjutan harus merombak habis paradigma pembangunan konvensional yang saat ini berlaku. Kepentingan pembangunan dalam jangka pendek harus lebih diseimbangkan dengan kepentingan jangka panjang. Kepentingan sosial dan lingkungan harus ditempatkan pada posisi yang setara dengan kepentingan ekonomi. Kepentingan sosial masyarakat harus lebih diselaraskan dengan kepentingan individu.

## **2.4 Daftar Pelatihan untuk Masyarakat ,Fasilitator dan Pemerintah**

Subab ini disunting dari buku Pelatihan untuk Prasaran Desa yang dituid oleh Richard Wayne ( 2019 ) dari halaman 25 sampai 30.

### **Pelatihan untuk Masyarakat**

1. Masyarakat harus ada meningkatkan prasarana desa
2. Masyarakat selalu mengikuti kegiatan pelatihan
3. Masyarakat selalu menggunakan perempuan dan orang miskin
4. Masyarakat ditambah lebih pintar dalam pelatihan
5. Masyarakat menggunakan prasarana supaya lebih murah
6. Masyarakat meningkatkan ekonomi desa tanpa ada korupsi
7. Masyarakat selalu menggunakan pemeliharaan prasarana
8. Masyarakat selalu menggunakan bahasa tertentu dalam pelatihan
9. Masyarakat menggunakan efektif untuk fasilitator, berdasarkan tujuh puluh tujuh topik

### **Fasilitator Membantu Masyarakat**

1. Fasilitator untuk desa-desa termasuk orang teknis dan orang sosial

2. Fasilitator sering melakukan pelatihan untuk masyarakat
3. Fasilitator membantu pelatihan khusus kader teknik desa
4. Fasilitator betul-betul mengetahui prasarana desa
5. Fasilitator melihat dan membantu finansial desa
6. Fasilitator membantu masyarakat supaya rapat desa menjadi lebih efektif
7. Fasilitator mengerti tentang pemeliharaan prasarana
8. Fasilitator mendapat pelatihan sendiri khusus dengan kualitas baik
9. Fasilitator menggunakan pemerintah kecamatan, kabupaten, dan provinsi

### **Pemerintah Membantu Masyarakat dan Fasilitator**

1. Pemerintah mengetahui persentase desa kecamatan, kabupaten, dan provinsi
2. Pemerintah selalu membantu untuk pekerjaan masyarakat
3. Pemerintah tidak melakukan korupsi dana desa
4. Pemerintah mengerti tentang pembuatan macam-macam prasarana desa
5. Pemerintah mengerti tentang pemeliharaan prasarana desa
6. Pemerintah menggunakan pemasok supaya pemilihan yang paling tepat
7. Pemerintah dulu tidak meminta pajak dari desa sejak 1979 s.d 2014, tetapi masyarakat boleh membayar pajak waktu itu untuk dibutuhkan pemasok
8. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kecamatan melatih pemerintah desa
9. Pemerintah dapat memeriksa kualitas prasarana yang ada di seluruh desa

### **Contoh Kegiatan Pelatihan yang Menarik**

1. Di akhir program PKGB di masing-masing provinsi selalu ada hanya tiga orang fasilitator yang dilatih sebelumnya dalam pelatihan untuk melatih seminggu di seluruh tempat oleh saya lima puluh persen.
2. Di PKGB ada materi pelatihan yang dilakukan oleh fasilitator lapangan, dengan tiap orang membuat acara pelatihan masing-masing untuk tiga topik. Akhirnya diputuskan pemilihan yang terbaik yang diusulkan terbaik untuk seluruh calon fasilitator.
3. Pernah ada lebih dari 600 fasilitator teknik kecamatan yang mengevaluasi fasilitator kabupaten dalam pelatihan di Jakarta, dan mereka ternyata sangat akurat. Setiap kelompok terdiri dari tujuh orang yang menentukan pekerjaan fasilitator kabupaten. Akhirnya ada fasilitator kabupaten dapat diberhentikan langsung oleh mereka.
4. Pernah ada lebih dari seratus foto di sekali oleh peserta di salah satu pelatihan di Papua 2013, dan diputuskan peserta yang sangat baik.
5. Sudah biasa dilakukan oleh semua peserta berbicara, supaya tidak ada peserta yang hanya diam, karena dulu sering ada peserta yang tidak bicara sama sekali.
6. Pernah ada belajar di Indonesia tentang bahasa Thailand, angka “satu” sampai dengan “lima”. Semua peserta mampu berbicara, tetapi semua tidak tahu tulisan

Thailand. Neung, Song, Saam, Sii, Haa (yang turun rendah, cara naik, cara naik, turun rendah, dan naik turun).

7. Pernah ada pelatihan untuk 700 peserta fasilitator kecamatan dan kabupaten dalam satu kelas, selama lima hari di Jakarta 2000.
8. Pernah ada pemakaian bahasa Inggris lebih dari satu jaman, supaya semua peserta mampu ingat bahasa Inggris.
9. Di Aceh 2005 tempat pelatihan seminggu untuk menambah kualitas fasilitator di tempat dekat Sigli di timur Banda Aceh. Ada empat kelas, dan dalam itu termasuk setiap kelas belajar tentang pelatihan satu jam oleh saya tentang penjelasan pelatihan khusus untuk semua fasilitator baru di Aceh.
10. Pernah melatih 40 calon fasilitator pertama kali ada P3DT untuk Sumatera (1997), dan sebagian sangat baik di banyak tempat. Sebagian melatih lebih dari empat tahun di P3DT dua tahun di Sumatera dan dua tahun di Jawa. Dan banyak mereka sering bekerja untuk PPK-2, PPK-3 dan PNPM Mandiri Perdesaan sampai dengan 2014.

Di bawah ini adalah lima belas macam pelatihan yang menarik yang saya pernah membuah dalam sekian tahun. Ini adalah penjelasan tentang acara pelatihan yang menarik, supaya peserta mendapat acara yang cukup efektif.

Pelatih harus selalu menulis yang mudah dilihat untuk seluruh peserta. Tulisan cukup besar dan sangat jelas.

1. Pelatih tidak hanya berdiri di satu tempat, supaya dia sering pindah ke tempat-tempat lain dengan secara cukup bebas.
2. Selalu ada kontak oleh pelatih kepada mata-mata untuk seluruh peserta. Pelatih selalu melihat semua peserta.
3. Pelatih harus berbicara dengan sangat jelas, dengan suara yang cukup besar.
4. Pelatih selalu melibatkan seluruh peserta dalam seluruh topik.
5. Pelatih kadang-kadang menggunakan topik yang sangat menarik untuk peserta.
6. Sering terjadi ada pertanyaan kepada setiap peserta, tetapi termasuk pertanyaan kepada pelatih dan ada jawaban dari peserta lain juga.
7. Kadang-kadang semacam pelatih dapat memberikan bahasa Inggris untuk seluruh peserta.
8. Kadang-kadang ada penjelasan tentang trial untuk peserta, supaya sebagian orang desa membuat contoh lokasi telford, misalnya, dari beberapa tingkat, supaya semua masyarakat dapat melihat detail konstruksi.
9. Ada penjelasan tentang vegetasi, supaya tebing jalan tidak kosong dan sering rusak.
10. Ada penjelasan juga tentang konstruksi tembok penahan tanah dan bronjong kawat untuk pinggir jalan, supaya tebing jalan akan bertahan cukup lama.

11. Dalam pelatihan sering ada acara Crawford Slip Writing atau acara keterangan Penggelontoran Pendapat supaya peserta mampu lebih menarik dan akhirnya dibuat kesimpulan.

12. Ada kegiatan di lapangan untuk pelatihan, termasuk cara menghitung panjangnya jalan kaki, kualitas telford, atau kualitas dari penilaian semua bagian jalan dan saluran.

13. Dalam sebagian pelatihan pernah ada setiap peserta dianggap menjadi kepala tim.

14. Di daerah Sigli Aceh, di daerah di Puncak Bogor, dan di tempat lain, semua peserta dapat menjawab satu cerita sampai dengan dua puluh cerita, supaya semua peserta berhasil dengan baik. Ada pejabat dari Bank Dunia mencoba melihat setiap orang akan mampu, dan ternyata mereka semua dapat mengucapkan dua puluh topik itu luar biasa yang bagus.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

Pembangunan prasarana di perdesaan harus diprioritaskan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih variatif. Pembangunan yang berbasis perdesaan diperlukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Dalam realisasinya, pembangunan perdesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke perdesaan, sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Oleh karena itu, infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang. Skala prioritas pembangunan perdesaan yang berbasis pada pengembangan perdesaan (rural based development), meliputi:

5. Pengembangan ekonomi lokal;
6. Pemberdayaan masyarakat;
7. Pembangunan prasarana dan sarana; dan
8. Pengembangan kelembagaan.

Ada dua sisi pandang untuk menelaah pembangunan perdesaan, yaitu:

3. Pembangunan perdesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan (intervensi) dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
4. Pembangunan perdesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan perdesaan.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh seberapa besar pemerintah daerah menaruh perhatian pada pemberdayaan masyarakat; karena regulasi tentang desa telah meletakkan dasar-dasar bagaimana pemerintah desa memerankan fungsinya dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber penerimaan desa untuk terciptanya pelayanan prima dan pembangunan di tingkat perdesaan. Oleh karena itu, keberhasilan program pembangunan desa akan sangat ditentukan oleh para pelaku pemerintahan yang ada di desa. Dan pemerintah daerah selaku penanggung jawab, sekaligus pembina pemerintahan desa harus dapat mendukung, baik dari sisi

regulasi maupun anggaran sebagaimana yang telah diatur dalam paket UU tentang Desa. Maka jelaslah sudah apa yang telah diatur dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan pada ketentuan perundang-undangan desa. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, implementasi UU Desa menggunakan dua pendekatan atau paradigma yaitu "desa membangun" dan "membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangan lingkungan hidup.

Membangun Indonesia dari memodernisasi desa merupakan solusi praktis untuk memajukan ekonomi rakyat. Pembangunan merupakan proses meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, yang ditandai dengan meningkatnya produksi, meningkatnya pendapatan dan meningkatnya tabungan masyarakat, atau dalam pembicaraan ekonomi sering disebut dengan *employment - income - growth* (portal EIG). *Growth* yang bersumber dari masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan di desa disebut pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah penyelenggaraan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya dilakukan secara partisipatoris dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Membangun masyarakat desa harus dimulai dengan menyadarkan setiap individu akan hakikat hidupnya. Setiap individu harus sadar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu setiap orang harus mampu bersyukur atas hidupnya, mampu bersenang-senang, dan selalu menyenangkan bagi sesamanya. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, modernisasi desa dilakukan dengan pendekatan manajemen kemajemukan dengan memanfaatkan modal sosial yang terbentuk di desa.

Dalam kenyataan terselenggaranya pembangunan desa tergantung dari kearifan lokalnya. Dengan adanya PPIP seharusnya bukan mengerus kearifan lokal tetapi harus memperkuat kearifan lokal yang ada. Hal ini sangat mungkin terjadi karena standar budaya Indonesia yang (1) religiusitas, (2) guyub, (3) multiculturality, (4) kepemimpinan fasilitatif, (5) komunikasi tersirat, (6) nrimo (nirima), (7) generalis dan teknikal excellence.

Dukungan dari sebuah warga adat yang berupa kearifan lokal sangatlah penting karena masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi lingkungannya. Masyarakat adat memiliki nilai dan motivasi yang kuat dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di dalam habitat mereka. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistemnya. Komitmen dan sinergitas dari seluruh kekuatan sosial masyarakat sangat dibutuhkan untuk proses pembangunan yang selaras dan bermanfaat luas bagi masyarakat dengan melibatkan nilai-nilai kearifan local yang selanjutnya menjadi modal social dalam pembangunan prasarana desa yang berwawasan lingkungan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Richard Wayne Gnagey, 2019 , Pelatihan Untuk Prasarana Desa,Nuansa Cendekia, Bandung
- Henny Warsilah, 2018, Kethanan Sosial Dalam Kota Tangguh Bencana,YPOI, Jakarta
- Sunyoto, Usman, 2018, Modal Sosial, Pustak Pelajar, Yogyakarta
- Wignyo Adiyoso, Manajemen Bencana,Bumi Askara,Jakarta
- MIT, 2017 , Konsep Dan Metode Pembangunan Berbasis Masyarakat, T.Sipil ITI, Serpong
- Gunawab S & Ari Wulandari, 2016, Membangun Indonesia dari Desa,Yogyakarta
- MIT, 2017, Pemberdayaan dalam Pembangunan Berkelanjutan, T.Sipil ITI, Serpong
- Aprillia dkk, 2015, Pembangunan Berbasis Masyarakat,Alfabeta, Bandung
- Roestanto Wahidi , 2015 Membangun Perdesaan Modern Jakarta
- Chatib, 2014, Dialektika Pembanguna Dengan Pemberdayaan,Fokusmedia, Bandung
- Undang –Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Thoby Mutis,dkk, 2009, Manajemen Kemajemukan ,Jakarta
- Dasgupta Partha & Serageldin Ismail, 1999,Social Capital, The World Bank, Washington D.C